



Tata Kelola Data Pemerintah Berbasis Elektronik

Drs.H.Soenarno
ANGGOTA KOMISI A
DPRD JAWA TENGAH

Semarang | 9 Agustus 2022

Permasalahan Data Pemerintah...



DATA
ADA
DI MANA-MANA
NAMUN KETIKA DICARI,
TIDAK
ADA
DI MANA-MANA

Pendahuluan

- Sesuai Peraturan Presiden no 39 tahun 2019 tentang Satu Data, untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah.
- Diperlukan standarisasi tata kelola data, dalam memberikan panduan penerapan tata kelola data yang baik (good governance of data) yang pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola Teknologi Informasi yang baik.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mempunyai tata kelola data berbasis elektronik.

Tata Kelola Data

- Data adalah salah satu aset terpenting dalam suatu organisasi.
- Data mewakili pelanggan organisasi, karyawan. Seperti kota dan peneliti mengeksplorasi pendekatan baru pada visualisasi dan penggunaan data dalam berbagai format.
- Sebagai praktik dengan akar dalam organisasi dan informasi tata kelola teknologi (TI), tata kelola data didefinisikan sebagai proses, kebijakan, standar, organisasi, dan teknologi diperlukan untuk mengelola dan memastikan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, konsistensi, kemampuan audit, dan keamanan data dalam suatu organisasi.

Tujuan Tata Kelola Data

- Tujuan tata kelola data adalah untuk:
 - a) Memastikan data memenuhi kebutuhan bisnis
 - b) Melindungi dan mengelola data sebagai aset organisasi yang dihargai
 - c) Menurunkan biaya pengelolaan data

Manfaat Tata Kelola Data

- Tata kelola yang baik atas data (good governance of data) dapat membantu organisasi dalam memastikan bahwa penggunaan data di organisasi berdampak positif terhadap kinerja organisasi dan membantu organisasi dalam memastikan kesesuaian dengan kewajiban seperti peraturan, undang-undang, atau kontrak terkait penggunaan dan penanganan data yang dapat diterima (ISO, 2007).

Dampak Tidak Kelola Data

- Tata kelola data yang tidak memadai dapat mengakibatkan organisasi menghadapi beberapa risiko, seperti: hukuman karena tidak ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku; hilangnya kerahasiaan data; hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan termasuk publik/masyarakat; ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi organisasi yang penting karena kurangnya data yang dapat dipercaya atau relevan dengan bisnis; dan peningkatan persaingan melalui penggunaan data secara strategis oleh yang tidak berhak, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat (ISO, 2017).

DATA MANAGEMENT (Managemen Data)

Proses mengelola data sebagai sumber daya yang berharga

bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kerangka kerja untuk mengelola data

pengumpulan, validasi, penyimpanan, pengorganisasian, perlindungan, pemrosesan, dan pemeliharaan data.

fokus pada aktifitas

VS

APA

SIAPA

MANFAAT

TARGET

DATA GOVERNANCE (Tata Kelola Data)

Kebijak, kontrol, atau peraturan agar menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

entitas yang secara holistik membangun kerangka kerja (data stewards, data custodian , dan lainnya) untuk manajemen data

blok bangunan pertama dari manajemen data, dengan fokus pada kerangka kerja untuk data berkualitas

lebih filosofis dan menyeluruh

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

KONDISI SAAT INI : KEBIJAKAN

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

UU 14/2008
Keterbukaan Informasi Publik
Sistem Informasi dan Dokumentasi

UU 25/2009
Pelayanan Publik
Sistem Informasi Pelayanan Publik

UU 43/2009
Kearsipan
Sistem Informasi Kearsipan

UU 23/2014
Pemerintahan Daerah
Sistem Pembangunan Daerah

Pembangunan SPBE bersifat Sektoral



Pengertian SPBE

PENGERTIAN SPBE



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

TUJUAN SPBE

TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya

2

Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

MANFAAT SPBE

MANFAAT

SPBE YANG TERPADU

- 1 Meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2 Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 3 Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4 Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 5 Terwujudnya keamanan informasi pemerintah



TERIMA KASIH